



**2020**

**Laporan Kinerja  
Pusat Data dan Sistem Informasi  
( PUSDATIN )**

# KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan Kinerja juga merupakan komponen dari prinsip "good governance" yang menjadi persyaratan bagi setiap instansi, dalam upaya mewujudkan visi dan misi Lembaga yang selaras dengan visi dan misi Presiden. Sejalan dengan itu, penyusunan Laporan Kinerja Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) Tahun 2020 dimaksudkan untuk melaporkan secara transparan penggunaan seluruh sumber daya yang menjadi kewenangan Badan Standardisasi Nasional (BSN) kepada semua pihak yang berkepentingan.

Laporan Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) Tahun 2020 merupakan Laporan Kinerja tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Surat Keputusan Sekretaris Utama BSN Nomor 22/KEP/SESTAMA/11/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan BSN, serta Rencana Strategis BSN Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) Tahun 2020 ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat dan umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja bagi organisasi dan seluruh Unit Kerja di lingkungan BSN di masa yang akan datang.

Jakarta, Januari 2021  
Pusat Data dan Sistem Informasi  
Kepala,



**Slamet Aji Pamungkas**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Perjanjian Kinerja Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) Tahun 2020 telah menetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja. Sasaran dan indikator kinerja tersebut merupakan perwujudan pelaksanaan Program Pengembangan Standardisasi Nasional yang diamanatkan kepada Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin).

Berikut disajikan tabel capaian perjanjian kinerja Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) Tahun 2020 menurut Sasaran:

**Tabel Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Capaian Tahun 2020**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian*)
1. Terselenggaranya implementasi e-Government di lingkungan BSN	1. Nilai SPBE	3 (Nilai)	3,99	100 %
2. Terselenggaranya tata kelola TIK sesuai standar nasional dan internasional	2. Tingkat kepatuhan terhadap SNI ISO/IEC 27001	100 %	100 %	100 %
	3. Service Level Agreement	95 %	95 %	100 %
	4. Tingkat kepatuhan terhadap SNI ISO 20000-1	100 %	100 %	100 %
3. Meningkatnya kinerja pengelola anggaran	5. Persentase realisasi anggaran Pusdatin	$\geq 97$ %	99 %	100%
<b>Rata-rata capaian Tahun 2020</b>				<b>100 %</b>

\*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 100%.

Dari 5 (lima) indikator kinerja indikator kinerja di Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin), keseluruhannya mencapai (memenuhi) target yang telah ditetapkan.

Namun untuk perbaikan berkelanjutan terhadap pencapaian target, maka perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Dilakukan sosialisasi seluruh unit kerja di BSN tentang implementasi SNI ISO/IEC 27001 (Sistem Manajemen Keamanan Informasi/ SMKI), sehingga seluruh unit kerja di BSN lebih peduli dengan SMKI tersebut.

2. Dibutuhkan dukungan komitmen dan anggaran dalam mencapai target SPBE maupun SLA (*Service Level Agreement*), karena pencapaian kedua hal tersebut memerlukan penambahan dan peremajaan sarana dan prasarana pendukung.

# DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>I.1 LATAR BELAKANG</b> .....	1
<b>I.2 MAKSUD DAN TUJUAN</b> .....	1
<b>I.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI</b> .....	2
<b>I.4 SUMBER DAYA MANUSIA</b> .....	3
<b>I.5 PERAN STRATEGIS</b> .....	3
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	5
<b>II.1 Perencanaan Strategis</b> .....	5
<b>II.1.1 Visi dan Misi</b> .....	5
<b>II.1.2 Tujuan dan Sasaran</b> .....	7
<b>II.2 Perjanjian Kinerja</b> .....	9
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	11
<b>III.1 CAPAIAN KINERJA</b> .....	11
<b>III.2 CAPAIAN DI LUAR PERJANJIAN KINERJA</b> .....	15
<b>III.3 REALISASI ANGGARAN</b> .....	17
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	18
<b>LAMPIRAN</b> .....	19
<b>PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI (PUSDATIN)</b> .....	19

## I.1 LATAR BELAKANG

Setiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah diatur dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi. Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tersebut juga menjadi kewajiban Pusdatin, sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Capaian kinerja Pusdatin memberikan kontribusi khususnya pada kinerja Sekretariat Utama dan secara keseluruhan terhadap BSN. Oleh karena itu, penyusunan Laporan Kinerja Pusdatin merupakan bahan masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Pusdatin Tahun 2020.

## I.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Pusdatin adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan program/kegiatan serta akuntabilitas kinerja dalam rangka mencapai visi dan misi Lembaga yang selaras dengan visi dan misi Presiden, dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Unit Kerja.

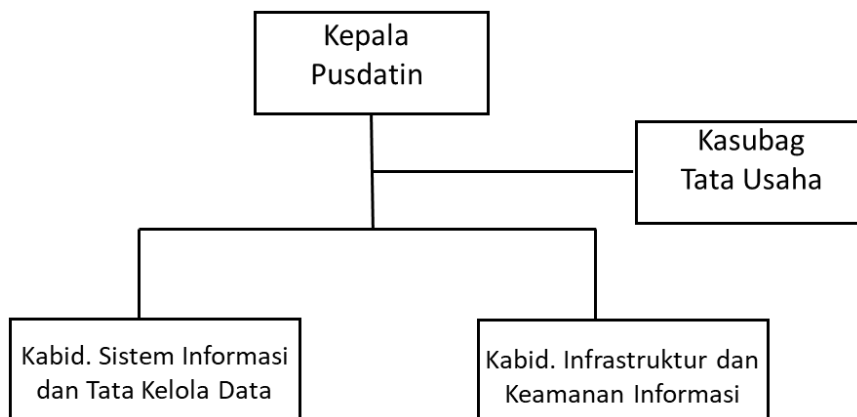
### I.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, tugas Pusdatin adalah melaksanakan pengelolaan sistem informasi dan tata kelola data standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Pusdatin menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana dan program pengembangan infrastruktur dan keamanan informasi, serta sistem informasi dan tata kelola data di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian;
2. pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, serta keamanan informasi;
3. pengelolaan sistem informasi dan tata kelola data di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian;
4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur dan keamanan informasi, serta sistem informasi dan tata kelola data di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian; dan
5. pelaksanaan urusan tata usaha Pusat Data dan Sistem Informasi.

Struktur Pusdatin dapat dilihat pada gambar berikut.



**Gambar I.1**  
**Struktur Organisasi Pusdatin**

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Pusdatin mempunyai tata kerja yang didukung oleh :

1. Bidang Sistem Informasi dan Tata Kelola Data, dengan tugas melaksanakan penyusunan program pengembangan, pengelolaan, evaluasi dan pelaporan sistem informasi dan tata kelola data di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian

2. Bidang Infrastruktur dan Keamanan Informasi, dengan tugas melaksanakan penyusunan program pengembangan, pengelolaan, evaluasi dan pelaporan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, serta pengelolaan keamanan

#### I.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan 31 Desember 2020 Pusdatin memiliki personel berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 17 (tujuh belas) orang, dengan rincian sesuai tabel berikut:

**Tabel I.1**  
**Personel ASN Pusdatin**

No	Uraian	Jenjang Pendidikan			Jumlah Orang
		> S1	S1	S2	
1.	Pusat Data dan Sistem Informmssi	..	...	1	1
2.	Sub Bagian Tata Usaha	..	1	...	1
3.	Bidang Infrastruktur dan Keamanan Informasi	2	4	2	8
4.	Bidang Sistem Informasi dan Tata Kelola Data	1	5	1	7
<b>Jumlah</b>		<b>3</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>17</b>

#### I.5 PERAN STRATEGIS

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), BSN diharapkan memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi selama ini.

Pusdatin mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN, yaitu dalam hal pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja internal BSN maupun dalam rangka mendukung peningkatan kualitas layanan masyarakat. Untuk itu, sesuai dengan tugas dan fungsinya Pusdatin telah mengidentifikasi potensi, permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN.



**Tabel I.2**  
**Potensi dan Permasalahan Pusdatin**

POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
Peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan TIK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplikasi SISPK yang ada kurang mendukung.</li> <li>• Kurangnya dukungan infrastruktur fisik TIK, khususnya yang berhubungan <i>data center</i>,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Redesign</i> dan revitalisasi SISPK.</li> <li>• Pengembangan <i>data center, backup</i> dan <i>data recovery center</i>.</li> </ul>
Peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja BSN dengan memanfaatkan TIK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya pemahaman pentingnya SMKI.</li> <li>• Belum termanfaatkannya TNDE secara optimal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi SMKI lebih intens dan masif.</li> <li>• Pemanfaatan TNDE secara konsekuen.</li> </ul>
Kemampuan ASN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu peningkatan kompetensi ASN untuk berbagai aspek</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan program dan alokasi anggaran pelatihan</li> </ul>
Pengetahuan tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum berpengalaman dalam penerapan sistem manajemen keamanan informasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan dokumentasi SMKI dan penerapannya</li> </ul>

## II.1 Perencanaan Strategis

### II.1.1 Visi dan Misi

**B**adan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu kesatuan pemerintah Republik Indonesia yang harus bekerja secara bersama-sama dan saling bersinergi dengan seluruh Kementerian/Lembaga sesuai dengan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, Kementerian/Lembaga (K/L) hanya memiliki 1 (satu) visi, yaitu visi Presiden Republik Indonesia 2020-2024 yaitu **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Hal ini berarti bahwa visi BSN harus selaras dengan visi Presiden Republik Indonesia, sehingga visi BSN sebagaimana yang tertuang dalam Renstra BSN Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

#### **VISI**

**“Badan Standardisasi Nasional yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”**

Secara umum, visi ini bermakna bahwa 5 (lima) tahun ke depan, semua upaya strategis yang dilakukan BSN harus bermuara untuk menggerakkan sektor pembangunan nasional melalui penerapan standardisasi dan penilaian kesesuaian secara komprehensif dan terintegrasi untuk menciptakan produk Indonesia terstandardisasi nasional dan berdaya saing global sehingga dapat turut serta dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri.

Presiden Republik Indonesia memiliki 9 (sembilan) misi yang dikenal dengan Nawacita Kedua yang harus dilakukan dalam pembangunan Indonesia 5 (lima) tahun (2020-2024) yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Memajukan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam konteks standardisasi dan penilaian kesesuaian, BSN berkontribusi secara langsung terhadap misi nomor 2, yaitu Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing. Oleh karena itu, misi Badan Standardisasi Nasional yang tertuang dalam Renstra BSN Tahun 2020-2024 yaitu:

## **MISI**

### **“Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing melalui Pengelolaan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian”**

Pengelolaan standardisasi dan penilaian kesesuaian ini meliputi tahapan :

1. Mengembangkan Standar Nasional Indonesia yang berkualitas dan responsif terhadap perubahan,
2. Menyelenggarakan tata kelola penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara komprehensif dan menyeluruh,
3. Mengelola sistem akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian dengan berorientasi pada kompetensi, konsistensi dan imparialitas serta keberterimaan global.
4. Mengelola standar nasional satuan ukuran untuk menjamin ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional.
5. Mengelola sumber daya manusia di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian berbasis modal manusia.
6. Menerapkan reformasi birokrasi BSN sesuai roadmap reformasi birokrasi nasional.

**Belum menuangkan penjelasan tentang kontribusi langsung unit kerja terhadap tahapan misi BSN**

**Setelah tahapan, diberikan keterangan dan penjelasan sebagai berikut: Dalam hal ini ..... (unit kerja es I/II/III) berkontribusi secara langsung terhadap tahapan, yaitu .....**

### II.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Tujuan Pusdatin mengacu pada tujuan BSN pada Renstra BSN Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

## TUJUAN

Tujuan	Indikator Tujuan
Terwujudnya produk Indonesia terstandarisasi nasional dan berdaya saing global	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ratio produk Indonesia ber-SNI yang diterima di negara tujuan ekspor, dengan target sd 2024 sebesar 20%.</li> <li>2. Ratio standardisasi produk Indonesia, dengan target sd 2024 sebesar 20%.</li> <li>3. Indeks ketersediaan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk Indonesia sesuai kepentingan nasional, dengan target sd 2024 sebesar 70%.</li> <li>4. Indeks pemenuhan produk terhadap SNI (rata-rata), dengan target sd 2024 sebesar 70%.</li> <li>5. Indeks pertumbuhan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) terakreditasi berdasarkan prioritas nasional dan pemenuhan kewajiban internasional, dengan target sd 2024 sebesar 5%.</li> </ol>

Tujuan	Indikator Tujuan
	<p>6. Indeks pertumbuhan pengakuan global terhadap Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU), dengan target sd 2024 sebesar 5%.</p> <p>7. Indeks kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), dengan target sd 2024 sebesar 70%.</p> <p>8. Nilai reformasi birokrasi BSN, dengan target sd 2024 sebesar 87 (nilai).</p>

Sasaran disini merupakan sasaran di lingkungan Pusdatin selaku Unit Pendukung di lingkungan BSN. Pusdatin dituntut agar dapat mengikuti perkembangan dan dinamika di lingkungan BSN untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja pelaksanaan fungsi BSN. Untuk itu, pencapaian kinerja Pusdatin harus dapat dinilai dari aspek ketepatan penentuan sasaran strategis, indikator kinerja, ketepatan target dan keselarasan antara kinerja output dan kinerja *outcome*.

Sasaran Pusdatin mengacu pada sasaran yang tertuang dalam Renstra BSN Tahun 2020-2024 dan Indikator Kinerja Utama BSN adalah sebagai berikut:

## SASARAN

Sasaran Pusdatin sesuai Renstra BSN Tahun 2020-2024 ialah sesuai dengan IKSS 18, yaitu: Nilai Reformasi Birokrasi (RB) BSN adalah nilai yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) setiap tahunnya dalam rangka evaluasi performa birokrasi instansi pemerintah. Reformasi Birokrasi merupakan program nasional yang bertujuan untuk merubah birokrasi di Indonesia menuju birorkasi yang profesional. Indikator ini bertujuan mengukur implementasi reformasi birokrasi di BSN. Bukti realisasi/pemenuhan dari IKSS ini adalah hasil asesmen KemenPAN RB terhadap implementasi RB BSN. Jika asesmen KemenPAN RB belum diterbitkan, maka digunakan hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMP-RB) BSN yang dikeluarkan oleh Inspektorat BSN.

**menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan dokumen IKU yang ditetapkan (terdapat sasaran dan indikator kinerja).**

## II.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan Pernyataan Kinerja atau Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk menilai keberhasilan organisasi pada akhir tahun.

Berikut adalah Perjanjian Kinerja Pusdatin Tahun 2020 berdasarkan sasaran, indikator kinerja dan target.

**Tabel II.1**  
**Perjanjian Kinerja Pusdatin Tahun 2020**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1. Terselenggaranya implementasi e-Government di lingkungan BSN	1. Nilai SPBE	3 (Nilai)
2. Terselenggaranya tat akelola TIK sesuai standar nasional dan internasional	2. Tingkat kepatuhan terhadap SNI ISO/IEC 27001	100 %
	1. Service Level Agreement	95 %
	2. Tingkat kepatuhan terhadap SNI ISO 20000-1	100 %
3. Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran	5. Persentase realisasi anggaran Pusdatin	$\geq 97 \%$

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Pusdatin pada tahun 2020 menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dimana setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada setiap pelaksanaannya.

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Pusdatin melaksanakan 1 (satu) kegiatan dalam 1 (satu) program. Adapun keseluruhan program dan kegiatan tersebut termasuk output yang akan dihasilkan adalah sebagai berikut:

### A. Program Dukungan Manajemen melalui :

1. Kegiatan: Peningkatan Data dan Sistem Informasi yang akan menghasilkan output:

- Output: Sistem Informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) Dalam rangka menghasilkan output ini, melaksanakan komponen kegiatan sebagai berikut:
  1. Pengelolaan Infrastruktur Jaringan dan Teknologi Informasi
  2. Pengelolaan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)
  3. Pengelolaan Sistem Informasi dan Tata Kelola Data
  4. Pembuatan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi SPK



akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga.

Pusdatin berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja. Laporan Kinerja tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk mendukung pencapaian kinerjanya, Pusdatin telah melaksanakan beberapa aktivitas kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan aktivitas kegiatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Pusdatin Tahun 2020.

### III.1 CAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Untuk mewujudkan visi dan misi Lembaga yang mendukung visi dan misi presiden, maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta aktivitas kegiatan sebagaimana telah disampaikan pada Bab II. Pencapaian masing-masing sasaran dan target yang terkait Pusdatin yang direncanakan dalam Tahun 2020 berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut.



**Tabel III.1**  
**Pencapaian Kinerja Pusdatin Tahun 2020**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian*)
1. Terselenggaranya implementasi e-Government di lingkungan BSN	1. Nilai SPBE	3 (Nilai)	3,99	100 %
2. Terselenggaranya tata kelola TIK sesuai standar nasional dan internasional	2. Tingkat kepatuhan terhadap SNI ISO/IEC 27001	100 %	100 %	100 %
	3. <i>Service Level Agreement</i>	95 %	95 %	100 %
	4. Tingkat kepatuhan terhadap SNI ISO 20000-1	100 %	100 %	100 %
3. Meningkatnya kinerja pengelola anggaran	5. Persentase realisasi anggaran Pusdatin	>= 97 %	99 %	100%

Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja Pusdatin untuk masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

<b>SASARAN 1</b>	Terselenggaranya implementasi e-Government di lingkungan BSN
----------------------	--

**Tabel III.1**  
**Capaian Kinerja Sasaran 1**

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2019	Capaian 2020			Capaian s.d 2020 (kumulatif)	
		%	Target	Realiasi	% *)	Target	% capaian
1. Nilai SPBE	Nilai	100 %	3	3,99	100 %	3	100 %

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Terselenggaranya implementasi e-Government di lingkungan BSN terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, yaitu **Nilai SPBE**. Capaian kinerja untuk indikator kinerja

tersebut rata-rata capaian sebesar 100 %, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Nilai SPBE tahun 2018 ialah 2,23 dan ditarget untuk tahun 2019 meningkat menjadi 2,6. Capaian tahun 2019 adalah nilai 3,99.
2. Untuk tahun 2020 target nilai SPBE BSN ialah 3 dan sesuai dengan penilaian 2019, maka tercapai nilai 3,99. Karena pada tahun 2020 BSN tidak termasuk yang dilakukan penilaian oleh KemenPANRB, sehingga nilai SPBE menggunakan nilai tahun 2019.
3. Keberhasilan pencapaian target SPBE didukung oleh implementasi SNI ISO/ IEC 27001:2013 yaitu Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI).

**SASARAN  
2**

Terselenggaranya tata kelola TIK sesuai standar nasional dan internasional

**Tabel III.2  
Capaian Kinerja Sasaran 1**

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2019	Capaian 2020			Capaian s.d 2020 (kumulatif)	
		%	Target	Realiasi	% *)	Target	% capaian
2. Tingkat kepatuhan terhadap SNI ISO/IEC 27001	%	100 %	3	3,99	100 %	3	100 %
3. Service Level Agreement	%	95 %	95 %	95 %	100 %	95 %	100 %
4. Tingkat kepatuhan terhadap SNI ISO 20000-1	%	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100%

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Terselenggaranya tata kelola TIK sesuai standar nasional dan internasional terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja. Yaitu:

1. Tingkat kepatuhan terhadap SNI ISO/IEC 27001.
2. Service Level Agreement (SLA).
3. Tingkat kepatuhan terhadap SNI ISO/IEC 20000-1.

Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 100 %., dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kepatuhan SNI ISO/IEC 27001 diberlakukan untuk seluruh BSN, akan tetapi lingkup sertifikasi hanya untuk lingkup Pusdatin saja.
2. Pada tahun 2019 Pusdatin berhasil mendapatkan sertifikat SNI ISO/IEC 27001:2013 dan berhasil dipertahankan pada tahun 2020.
3. Kepatuhan SNI ISO/IEC 20000-1 untuk saat ini hanya diberlakukan di Pusdatin BSN saja.
4. Service Level Agreement (SLA) tercapai, namun dengan beberapa catatan, antara lain:
  - a. Perlu peningkatan kapasitas data center, karena data center yang ada saat ini masih perlu perbaikan dalam beberapa hal, antara lain: sistem pemadam kebakaran, kunci/ pengamanan rak server dan CCTV.
  - b. Perlu perbaikan dalam pemanfaatan singel sign on, di mana saat ini hanya diberlakukan untuk beberapa aplikasi saja.

<b>SASARAN 3</b>	Meningkatnya kinerja pengelola anggaran
----------------------	---

**Tabel III.3  
Capaian Kinerja Sasaran 1**

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2019	Capaian 2020			Capaian s.d 2020 (kumulatif)	
		%	Target	Realiasi	% *)	Target	% capaian
5. Persentase realisasi anggaran Pusdatin	%	97 %	97 %	99 %	100 %	97	98 %

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatkan kinerja pengelola anggaran terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 100 %, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Karena pandemi Covid-19, maka beberapa anggaran dialihkan untuk mendukung penanganan Covid-19 secara nasional.
2. Perlu ditingkatkan anggaran untuk mendukung pengembangan data center dan juga pengembangan SISPK.

### III.2 CAPAIAN DI LUAR PERJANJIAN KINERJA

Selain capaian sesuai dengan yang tertera dalam Perjanjian Kinerja, Pusdatin juga melakukan berbagai hal dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran organisasi, antara lain:

#### a. Melakukan Bimbingan Teknis Penerapan Manajemen Risiko SPBE

BSN melalui Pusat data dan Sistem Informasi BSN mendukung penerapan manajemen risiko SPBE. Untuk itu, BSN bekerja sama dengan Kementerian PAN RB melakukan bimbingan teknis penerapan manajemen risiko SPBE bagi 170 Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Pemerintah Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan dalam 2 gelombang pada tanggal 7-9 Juli dan 23 - 25 Juli 2020.

#### b. Sosialisasi penerapan SNI ISO/IEC 27001 Sistem Manajemen Keamanan Informasi pada Perguruan Tinggi

Untuk mendukung penerapan SNI diberbagai sektor, Bidang Sistem Informasi dan Tata Kelola Data bekerja sama dengan Bidang Infastruktur dan Keamanan Informasi melaksanakan sosialisasi SNI ISO/IEC 27001 Sistem Manajemen Keamanan Informasi pada berbagai perguruan Tinggi, antara lain :

- Universitas Diponegoro - Semarang
- Institut Teknologi 10 November – Surabaya
- Universitas Islam Indonesia – Yogyakarta
- Universitas Telkom – Bandung
- Universitas Mercubuana – Jakarta
- Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah – Jakarta
- Institut Teknologi Al Kamal - Jakarta
- Universitas Sains dan Alquran – Wonosobo

#### c. Sosialisasi penerapan SNI ISO/IEC 27001 Sistem Manajemen Keamanan Informasi pada Instansi Pemerintah

Untuk memeriahkan Bulan Mutu Nasional dan mendukung penerapan SNI diberbagai sektor, Bidang Sistem Informasi dan Tata Kelola Data bekerja sama dengan Bidang Infastruktur dan Keamanan Informasi melaksanakan sosialisasi SNI ISO/IEC 27001 Sistem Manajemen Keamanan Informasi untuk Lembaga pemerintah.

**d. Bimbingan Penerapan Standar SNI ISO/IEC 27001 Sistem Manajemen Keamanan Informasi**

Dalam kerangka Kerjasama antar Lembaga pemerintah, Pusat data dan Sistem Informasi BSN membantu Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) dalam penerapan Standar SNI ISO/IEC 27001 Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Bidang Sistem Informasi dan Tata Kelola Data mengirimkan 2 personelnnya untuk membantu program tersebut.

**e. Bimbingan Penilaian Mandiri SPBE**

Dalam kerangka Kerjasama antar Lembaga pemerintah, Pusat data dan Sistem Informasi BSN membantu Ombudsman Republik Indonesia dalam Menyusun dokumen penilaian mandiri SPBE. Bidang Sistem Informasi dan Tata Kelola Data mengirimkan 2 personelnnya untuk membantu program tersebut.

**f. Meraih penghargaan Top Digital Awards**

Pusat data dan Sistem Informasi mewakili BSN mendapat kesempatan mengikuti penghargaan Top Digital Awards, yaitu sebuah penghargaan yang diberikan kepada organisasi yang konsisten dalam melahirkan inovasi pengembangan aplikasi sistem informasi guna memudahkan layanan bagi pelanggannya. BSN mendapatkan 2 penghargaan, yaitu Top Digital Awards Bintang 4 untuk Kategori Layanan Publik dan CEO Top Digital Awards.

### III.3 REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-084.01-0/2020 tanggal 12 November 2019, pagu anggaran TA 2020 Pusdatin adalah sebesar Rp 1.573.730.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.568.326.000 atau 99,6 %.

Pagu dan realisasi anggaran Pusdatin TA. 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel III.4**  
**Pagu dan Realisasi Anggaran**  
**Pusdatin TA. 2020**

*Dalam rupiah*

Kode	Kegiatan/Output/Komponen	2020		%
		Pagu	Realisasi	
051	Pengelolaan infrastruktur jaringan teknologi informasi	790.400.000	788.815.000	99,7
052	Pengelolaan Sistem Manajemen Keamanan informasi (SMKI)	178.608.000	178.419.000	99,8
053	Pengelolaan Sistem Informasi dan Tata Kelola Data (SITKD)	254.722.000	252.942.000	99,3
054	Pembuatan dan pengembangan aplikasi sistem informasi SPK	350.000.000	348.150.000	99,4
	<b>Jumlah</b>	<b>1.573.730.000</b>	<b>1.568.326.000</b>	<b>99,6</b>

Laporan Kinerja Pusdatin Tahun 2020 menyajikan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Pusdatin Tahun 2020 dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Pusdatin Tahun 2020, sebagian besar/seluruh kinerja kegiatan telah terlaksana sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yaitu:

1. Pencapaian nilai SPBE yang diberikan target nilai 3, tercapai nilai 3,99.
2. Tingkat kepatuhan terhadap SNI ISO/IEC 27001:2013 tercapai 100%.
3. *Service Level Agreement (SLA)* tercapai sesuai target, yaitu 95%.
4. Tingkat kepatuhan SNI ISO 20000-1 tercapai sesuai target, yaitu 100%.
5. Persentasi realisasi anggaran Pusat Data dan Sistem Informasi diberikan target 97 %, tercapai 99,6 %.

Selain pencapaian target yang telah ditentukan, Pusdatin juga berhasil melakukan capaian lain, baik capaian layanan internal BSN maupun eksternal, antara lain:

1. Penghargaan dari ICIO untuk Kepala Pusdatin pencapaian terbaik tahun 2020.
2. Penghargaan Top Digital Award tahun 2020 untuk Implementasi TIK di BSN pada level bintang 4.
3. Dipercaya oleh Kemenparb untuk menjadi nara sumber dan instruktur pada kegiatan bimbingan teknis Manajemen resiko untuk seluruh K/L/D di Indonesia.
4. Pelaksanaan sosialisasi SNI ISO/IEC 27001:2013 (SMKI) di berbagai perguruan tinggi di Indonesia.
5. Pelaksanaan sosialisai dan bimtek SMKI untuk wilayah propinsi Jawa Tengah, dalam rangka mendukung Bulan Mutu Nasional tahun 2020.

**Dituangkan langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya**

## LAMPIRAN

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI (PUSDATIN)

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1 Terselenggaranya implementasi e-Government di lingkungan BSN	1 Nilai SPBE	3 Nilai
2 Terselenggaranya tata kelola TIK sesuai standar nasional dan internasional	2 Tingkat kepatuhan terhadap ISO27001	100 %
	3 Service Level Agreement	95 %
	4 Tingkat kepatuhan ISO 20001	100 %
3 Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran	5 Persentase realisasi anggaran Pusat Data dan Sistem Informasi	≥97 %





 Gedung I BPPT Lantai 11, Jl. MH Thamrin No. 8  
Kebon Sirih Jakarta Pusat 10340

 [pusdatin@bsn.go.id](mailto:pusdatin@bsn.go.id)

 021 3927422 ext (166)